

Partisipasi Politik Pemilih Perempuan di Kepulauan Riau

Rapida Nuriana

STIE Pembangunan Tanjungpinang
Email: rafidanuriana@gmail.com

Satriadi

STIE Pembangunan Tanjungpinang
Email: satriadi@stie-pembangunan.ac.id

Muhammad Rahmat

Universitas Ibnu Sina Batam
Email: muhammadrhmat@gmail.com

Sharil Budiman

STISIPOL Raja Haji
Email: shahril@stisipolrajahaji.ac.id

Korespondensi penulis: rafidanuriana@gmail.com

Abstract. *This study aims to see the differences in political participation in female voters in the gubernatorial election in terms of age and level of education. The research method used is quantitative of comparative type. The subjects in this study were 180 female voters in the Riau Islands. Based on the results with the calculation of an o va two paths obtained political participation based on age with a significance of 0.026 ($p < 0.05$), political participation based on education level with significance of 0.23 ($p > 0.05$) and an interaction test between age and education obtained a significance value of 0.002 ($p < 0.05$). The results showed that there were differences in political participation in female voters by age but no differences in political participation in female voters based on education level. In addition, there is an interaction of age categories with education in women's participation in political participation.*

Keywords: *Political Participation, Age, Education, Female Voters.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan dalam pemilihan gubernur ditinjau dari usia dan tingkat pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berjenis komparatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 180 pemilih perempuan di Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil dengan perhitungan anova dua jalur diperoleh partisipasi politik berdasarkan usia dengan signifikansi 0,026 ($p < 0,05$), partisipasi politik berdasarkan tingkat pendidikan dengan signifikansi 0,23 ($p > 0,05$) dan uji interaksi antara usia dengan pendidikan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,002 ($p < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan berdasarkan usia namun tidak terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan berdasarkan tingkat pendidikan. Selain itu, terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan perempuan dalam partisipasi politik.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Usia, Pendidikan, Pemilih Perempuan.

LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah yang demokratis. Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berpaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat. Senada dengan hal tersebut, Robert Dahl menyatakan bahwasannya sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus memiliki sebuah perwujudan seperti partisipasi dan kontestasi yang mewujud pada dibukanya kran sistem multipartai dan pemilu yang bebas dan adil. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik (Widodo, 2018).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pesta demokrasi selama tiga tahun berturut-turut. Pada tanggal 27 Juni 2018 pemilihan kepala daerah (pilkada) (KPU, 2018). Kemudian pada Rabu, 17 April 2019 dilakukan pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD (KPU, 2019). Terakhir di tengah pandemi Covid-19, tanggal 9 Desember 2020 untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota di 9 provinsi (KPU, 2020).

Setiap masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dikenal dengan istilah partisipasi politik, karena pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dapat mempengaruhi peraturan dan keputusan yang otoritatif (Deth, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai pemilih dapat mempengaruhi hasil pemilu. Kepulauan Riau menjadi satu diantara provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur.

Adapun tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia sebagai pemilih didominasi oleh perempuan. Data ini didapatkan dari KPU Nasional mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 yang menunjukkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 96.557.044 orang sedangkan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 96.271.476 orang (One, 2019). Tidak hanya saat ini, data pemilih pada tahun 2014 dan 2004 pun mayoritas adalah perempuan, meskipun saat itu kegiatan ini masih dianggap tidak terlalu

penting bagi kalangan perempuan (Ismanto, 2004). Hal ini dikarenakan adanya berbagai pengaruh seperti usia dan tingkat pendidikan (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012).

Berdasarkan tinjauan peneliti terdahulu mengenai partisipasi perempuan dalam berpolitik itu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Djou, MA dan Quintarti (2018) dengan judul penelitian “partisipasi perempuan dalam partai politik dan pemilu serempak” yang mengatakan bahwasannya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan didalam parlemen sejatinya tidak hanya berbicara agar perempuan mampu mengakomodir kepentingan semata, tetapi juga terdapat nilai-nilai yang lebih dalam, yaitu etika kepedulian yang menggambarkan cara khas perempuan dalam bereksistensi.

Penelitian lain serupa juga dilakukan oleh Eko Ari Wibowo, Muradi, dan Arif Sudirman (2019) dengan judul “strategi sosialisasi dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada serentak di kota Magelang” yang mengatakan bahwasannya pendekatan yang paling efektif digunakan dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada serentak di Kota Magelang adalah pendekatan formal, informal dan media massa.

Kemudian hasil wawancara dilakukan di sekitaran café tepi laut Tanjungpinang yang banyak di antaranya mencoblos pada pemilu tahun lalu. Dalam 26 keluarga terdapat 61 pemilih produktif yang sebagian besar berusia antara 25 sampai 40 tahun dengan keadaan yang berbeda-beda dan sebagian besar adalah perempuan. Mereka mengatakan nilai suara sangat penting sehingga mereka tetap memilih. Sementara itu, sebagian masyarakat yang tinggal di sekitarnya yang rata-rata berusia di atas 40 hingga 60 tahun masih terlalu banyak untuk tidak memilih. Berbeda dengan daerah lain, perempuan di atas 40 tahun mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghindarinya selama mereka memiliki kesehatan yang baik dan terdaftar di DPT.).

Selain usia, yang dapat mempengaruhi partisipasi politik adalah status sosial seperti kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang ditentukan oleh tingkat pendidikan (Kusmanto, 2013). Menurut Sundari dan Waluyati (2014) tingkat pendidikan berbanding lurus dengan partisipasi politik. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Mulyawarman (2009) yang mengungkapkan bahwa pemilih dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi) memilih kepala desa dengan pertimbangan seperti pengalaman dan

kelayakan kandidat, namun pemilih dengan tingkat pendidikan yang rendah memilih karena sekedar mengenal sosok kandidat tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang subjektif. Tak hanya itu, menurut Astuti, Afandi, dan Listuani (2014) mengungkapkan pendidikan juga menjadikan perempuan berkualitas sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi politik. Oleh karena itu, pendidikan dapat menentukan bagaimana peran perempuan sebagai pemilih. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik melihat perbedaan partisipasi politik pada perempuan ditinjau dari usia dan tingkat pendidikan.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga dipahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Surbakti (Wibowo et.al, 2019), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain.

1. Status sosial dan ekonomi Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
2. Situasi Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti, cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
3. Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik

masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai aktivitas politik, seperti ikut dalam partai politik, dalam pemerintahan, ikut dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. 5. Kepercayaan terhadap Pemerintah. Kepercayaan terhadap Pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap Pemerintah apakah ia menilai Pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan cara menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik, dan menguji hipotesis sedangkan komparatif artinya membedakan satu atau lebih variabel pada sampel. Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah partisipasi politik. Populasi penelitian adalah pemilih perempuan di Kepulauan Riau. Sampel penelitian diambil sebanyak 100 orang pemilih perempuan yang telah terdaftar dalam pemilu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu siapa saja yang dijadikan sampel akan melalui pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Sukandarrumidi, 2012). Jadi setiap sampel disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu memiliki KTP wilayah Kepulauan Riau, mempunyai hak pilih, perempuan dan rentang usia yaitu remaja, dewasa, dan lanjut usia. Skala pada penelitian ini berbentuk Likert. Skala Likert merupakan skala yang berisikan pernyataan dan menunjukkan bagaimana sikap subjek (Prasetyo & Lina, 2008). Skala ini akan diberikan skor pada setiap responnya yang terdiri dari 4 macam yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Tahap awal yang dilakukan adalah dengan uji coba (tryout) diberikan berupa angket kepada 10 orang perempuan guna untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas alat ukur. Validitas alat ukur pada penelitian ini ada dua macam yaitu validitas isi dan validitas

konstrak. Validitas isi didapatkan dengan pengujian yang dilakukan oleh professional judgement. Sedangkan validitas konstrak menggunakan ketentuan korelasi dengan nilai sebesar $r = 0,30$ (Azwar, 2008). Berdasarkan analisis dengan bantuan JASP, item yang dapat digunakan sebanyak 39 item dari 43 item yang telah diuji coba dengan nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.847. Tahap kedua, setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, angket diberikan pada partisipan. Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk pengisian skala sebelum diisi agar partisipan memahami cara pengisian skala. Tahap ketiga, peneliti menganalisis data yang telah didapatkan dengan anava dua jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mendeskripsikan bagaimana perbedaan rerata empiris dengan hipotetis. Dari hasil menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki nilai rerata empiris lebih tinggi daripada nilai rerata hipotetis ($\mu_e = 99,32 > \mu_h = 78$). Artinya partisipasi politik pada pemilih perempuan lebih tinggi daripada populasi pada umumnya. Perbedaan partisipasi politik pada subjek penelitian akan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Masing-masing kategori memiliki rentang skor. Berikut adalah pengkategorian partisipasi politik

Tabel 1. Kategorisasi Skala Partisipasi Politik

Rumus	Skor	Kategorisasi	Subjek	
			F (Σ)	%
$(\mu + 1,0 \sigma) \leq X$	$97,5 \leq X$	Tinggi	30	30
$(\mu - 1,0 \sigma) \leq X < (\mu + 1,0 \sigma)$	$58,5 \leq X < 97,5$	Sedang	70	70
$X < (\mu - 1,0 \sigma)$	$X < 58,5$	Rendah	0	0
Jumlah			100	100

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan table 1.1., diketahui bahwa terdapat 30 orang berada pada kategori tinggi dan 70 orang berada pada kategori sedang. Namun tidak ada yang berada pada

kategori rendah. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa subjek pada Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan subjek dalam penelitian ini memiliki skor partisipasi politik yang sedang ke tinggi. Selanjutnya rerata aspek-aspek partisipasi politik pemilih perempuan dilihat berdasarkan kategori usia dan tingkat pendidikan.

Pada kategori usia, remaja dalam aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 38,3. Kemudian pada aspek motif partisipasi didapatkan rata-rata 27,9 dan pada aspek konsekuensi partisipasi didapatkan rata-rata 33,8. Sedangkan pada rentang usia dewasa pada aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 48,8, pada aspek motif berpartisipasi didapatkan rata-rata 29,6 dan pada aspek konsekuensi berpartisipasi didapatkan rata-rata 23,6. Sekarang pada rentang lanjut usia pada aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 39,4, pada aspek motif partisipasi didapatkan rata-rata 27,9, dan pada aspek konsekuensi partisipasi didapatkan rata-rata 34,7. Pengkategorian usia berdasarkan aspek-aspek partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Skor Kategori Usia Per Masing-Masing Aspek Partisipasi Politik

Kategori	Aspek	Rata-Rata
Remaja	Aspek 1	38,3
	Aspek 2	27,9
	Aspek 3	33,8
Dewasa	Aspek 1	48,8
	Aspek 2	29,6
	Aspek 3	23,6
Lansia	Aspek 1	39,4
	Aspek 2	27,9
	Aspek 3	34,7

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 2, secara keseluruhan berdasarkan kategori usia per masing-masing aspek partisipasi politik, aspek gaya partisipasi mendapatkan rerata paling tinggi disusul oleh aspek konsekuensi partisipasi dan yang paling rendah pada aspek motif berpartisipasi, sedangkan rentang usia dewasa merupakan usia yang mendapatkan rerata

partisipasi politik yang paling tinggi, dan diikuti oleh remaja sedangkan lanjut usia mendapatkan rerata terendah.

Pada tingkat pendidikan SMA dalam aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 38,3. Kemudian pada aspek motif berpartisipasi didapatkan rata-rata 27,9 dan pada aspek konsekuensi partisipasi didapatkan rata-rata 33,8. Sedangkan pada tingkat pendidikan sarjana pada aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 48,8 kemudian pada aspek motif berpartisipasi didapatkan rata-rata 29,6, dan pada aspek konsekuensi berpartisipasi didapatkan rata-rata 23,6. Pengkategorian usia berdasarkan aspek-aspek partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Skor Kategori Pendidikan Per Masing-Masing Aspek Partisipasi Politik

Kategori	Aspek	Rata-Rata
SMA	Aspek 1	38,3
	Aspek 2	27,9
	Aspek 3	33,8
Sarjana	Aspek 1	48,8
	Aspek 2	29,6
	Aspek 3	23,6

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 3., diketahui bahwa secara keseluruhan pada kategori pendidikan per masing-masing aspek partisipasi politik pada aspek gaya partisipasi mendapatkan rerata paling tinggi disusul oleh aspek konsekuensi partisipasi dan yang paling rendah pada aspek motif berpartisipasi. Sedangkan tingkat pendidikan Sarjana mendapatkan rerata partisipasi politik yang paling tinggi dan di ikuti oleh tingkat pendidikan SMA.

Pengujian normalitas sebaran data penelitian menggunakan uji Kolmogorov-Smornov Test. Hasil uji normalitas pada partisipasi politik memiliki nilai p sebesar 0,200 ($p > 0,05$). Uji normalitas pada kategori usia yaitu remaja sebesar 0,200, dewasa sebesar 0,68, dan lansia sebesar 0,200. Kemudian uji normalitas pada tingkat pendidikan yaitu SMA dan sarjana sama yaitu sebesar 0,200. Secara keseluruhan data sudah berdistribusi normal.

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan model statistik Levene statistic. Pada variabel partisipasi politik berdasarkan usia, diperoleh $p = 0,069$ ($p > 0,05$) dan berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh $p = 0,557$ ($p > 0,05$). Artinya, varian data bersifat homogen. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan teknik anava 2 jalur.

Hasil perhitungan pada partisipasi politik pada kategori usia didapatkan F sebesar 5,586 dengan signifikansi berada diangka 0,004 ($p < 0,05$), dengan kata lain terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan pada rentang usia. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada partisipasi politik pada kategori pendidikan didapatkan F sebesar 5,240 dengan signifikansi berada diangka 0,23 ($p > 0,05$), dengan demikian tidak terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan pada tingkat pendidikan. Kemudian uji interaksi antara usia dengan pendidikan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,002 ($p < 0,05$) yang berarti terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan pemilih perempuan dalam partisipasi politik.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi politik pada pemilih perempuan di Kepulauan Riau dengan melihat rentang usia dan tingkat pendidikan. Hasil uji hipotesis penelitian terdapat perbedaan usia pada partisipasi politik pemilih perempuan di Kepulauan Riau, hal ini sejalan dengan laporan riset pemilu KPU 2019 di Provinsi Bali dimana didapatkan data yaitu jenis kelamin perempuan merupakan pemilih terbanyak dengan rentang usia muda (remaja dan dewasa). Hasil uji hipotesis partisipasi politik berdasarkan tingkat pendidikan pada pemilih perempuan di Kepulauan Riau menunjukkan tidak adanya perbedaan. Hal ini bertentangan dengan teori-teori yang menyatakan jika pendidikan merupakan faktor yang akan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan.

Astuti, Afandi, dan Listuani (2014) mengungkapkan bahwa pendidikan menjadikan perempuan berkualitas sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi politik. Minimnya tingkat pendidikan dapat menurunkan angka partisipasi politik pada perempuan (Shvedova, 2005). Selain itu, menurut Kusmanto (2013) warga yang

berpendidikan tinggi biasanya lebih partisipatif. Pendidikan tidak berpengaruh dalam partisipasi politik perempuan di Kepulauan Riau namun masih dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan sosial, masih timpangnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia membuat pengaruh politik uang dan pembagian sembako masih sangat tinggi dikalangan masyarakat, ini dibuktikan dengan aspek motif berpartisipasi mendapatkan skor yang paling rendah dalam penelitian ini.

Menurut Tia (2014) tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang menjelang pemilu pilkada, terjadinya politik uang dikarenakan masyarakat mulai rasional dalam memandang partisipasi politik. Sedangkan Lia (2019) menemukan pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Heni (2019) generasi Z (17-21) tahun banyak melakukan partisipasi politik instrumental dari pada partisipasi strategis.

Permasalahan yang banyak terjadi saat ini dalam partisipasi politik warga negara Indonesia kebanyakan pemilih memilih bukan menggunakan analisis untuk memilih calon kepala daerah yang akan memimpin jika terpilih nanti, sehingga berimbas kepada terpilihnya pemimpin yang kurang kompeten. Permasalahan kesejahteraan sosial juga menjadi faktor yang mendukung permainan politik uang di Indonesia, walaupun tingkat partisipasi pemilih perempuan tinggi di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau tapi tidak di iringi dengan pemanfaatan tingkat pendidikan sehingga banyak terjadi bias dalam perpolitikan Indonesia.

Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan pemilih perempuan dalam partisipasi politik. Remaja dengan kategori tingkat pendidikan SMA lebih aktif dalam aspek gaya berpartisipasi dalam politik tapi hasil lebih rendah di aspek konsekuensi dan motivasi dalam partisipasi politik, hal ini sesuai dengan beberapa teori psikologi perkembangan yang menyatakan jika remaja memiliki energi yang berlebih dan mempunyai keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Lalu pada remaja dengan kategori tingkat pendidikan sarjana pada aspek motivasi berpartisipasi lebih tinggi dari pada remaja dengan tingkat pendidikan SMA, dalam hal ini remaja dengan tingkat pendidikan sarjana sudah mulai mempertimbangkan alasan kenapa mereka ingin ikut dalam partisipasi politik di daerah mereka. Rentang umur dewasa dengan tingkat pendidikan SMA juga hampir sama

dengan remaja di tingkat pendidikan yang sama, rentang umur dewasa juga aktif dalam dalam gaya berpartisipasi politik hanya saja aspek konsekuensi dan aspek motif berpartisipasi pada pemilih dewasa lebih tinggi dari pada remaja dengan tingkat pendidikan SMA.

Pemilih dewasa dengan tingkat pendidikan sarjana pada aspek gaya berpartisipasi juga tinggi hanya saja dewasa pada tingkat pendidikan sarjana memiliki nilai lebih tinggi pada aspek motivasi berpartisipasi, ini menunjukkan jika dewasa dengan rentang pendidikan sarjana memiliki motif atau alasan yang lebih tinggi dalam berpartisipasi politik. Pada rentang umur lanjut usia pemilih wanita dalam partisipasi politik, pada setiap aspek pemilih lanjut usia baik dengan tingkat pendidikan SMA atau sarjana lebih rendah dibandingkan pemilih dengan rentang usia remaja dan dewasa, hal ini menunjukkan baik dalam aspek gaya berpartisipasi, motivasi berpartisipasi atau konsekuensi berpartisipasi emilih wanita dengan rentang usia lanjut usia lebih rendah dari ada rentang umur remaja dan dewasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat partisipasi politik di Kepulauan Riau, Terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan ditinjau dari usia dalam pilgub Kepulauan Riau, Tidak terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan ditinjau dari tingkat pendidikan dalam pilgub Kepulauan Riau 2020, Terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan pemilih perempuan dalam partisipasi politik pilgub Kepulauan Riau 2020.

Adapun saran dalam penelitian ini yakni :

1. Kepada Suami dan Keluarga perlu diberikan pemahaman tentang betapa mulianya memperjuangkan nasib dan kepentingan politik perempuan yang masih termarjinalkan di negeri ini.
2. Perlu dilakukan seminar, simposium, lokakarya, diskusi publik di tingkat desa/kelurahan dengan tema Partisipasi Politik dan Perempuan dengan melibatkan elit perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggarini, Mery, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra. 2018. Pengaruh Kesadaran Dan Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya Pada PILKADA 2015. *Jurnal Madania*. Vol 8
- Astuti, P., Afandi, M. A. & Listuani R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Litbang Kebijakan*. Surabaya: Cakrawala. Vol 13(2). Hal : 1 –24.
- Azwar, S. (2008). *Penyusunan skalapsikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gadi Djou, Ana Maria dan Liza Quintatarti. 2018. Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak. *Jurnal UNNES*.
- Ismanto, I. (2004). *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi
- KPU RI. (Producer). (2018). *Sosialisasi Pilkada Serentak 2018*. Jakarta. (<https://www.youtube.com/watch?v=PTEYN4DTSuM>). Diakses 07 Juli 2020
- KPU RI. (2019). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019*. Jakarta
- KPU Kepulauan Riau. (2020). *Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020*. Padang. (<https://www.instagram.com/p/CFhIGU7JWzR/?igshid=8cn5c2lgif3c>). Diakses 25 September 2020
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 1(1), 28 –36.
- Mujani, S., Liddle, R.W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde*. Bandung: Mizan
- One. (2019). *Daftar Lengkap DPT Pemilu 2019 Seluruh Indonesia*. Jakarta: Pojoksatu.id. Diakses 10 Juli 2020 <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/02/03/daftar-lengkap-dpt-pemilu-2019-seluruh-indonesia/>
- Safitri, Rani S.Sos & Dr. Oksep Adhayanto., MH. 2017. Partisipasi Politik Perempuan Dalam Menyukkseskan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2. No. 1. Shvedova, N. (2005). *Obstacles to Women's Participation In Parliament*. *Women in Parliament: Beyond Numbers*. No. 33. Hal: 22 –45
- Subekti, Tia. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sundari, L., Alfianra, A., & Waluyati, S.A. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan

Praktik Pendidikan PKn, 1(1).

Sukandarrumidi. (2012). Metodologi penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Semula. Yogyakarta: UGM Press

Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014).Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora,2(1), 30-41.

Wibowo, Ari Eko dkk. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak di Kota Magelang. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 05

Widodo, Wahyu. (2018). Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum. Jurnal Meta-Yuridis. Vol 1. No 1.

Van Deth, J. W. (2014). A Conceptual Map of Political Participation. Acta Politica, Vol 49(3) Hal: 349-367.